

DAMPAK PENERAPAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Desi Azzahra Sunty¹, Natasya Alvionita², Khaira Aprilia Khairunnisa³, Cholina Aprilian Partangi
Sinaga⁴, Tegar Victor Pratama Aritonang⁵

Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: khairunnissaaprilia@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>The implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Indonesia aims to improve the welfare of the community, especially for poor families. This program replaces cash food assistance with a more efficient non-cash system. With Rp110,000 per month transferred through an ATM or Family Welfare Card, BPNT is expected to increase nutritious food consumption and reduce the expenditure burden of poor households. This study uses the literature review method to evaluate the impact of BPNT on community welfare. The results show that although BPNT has been successful in improving food access, there are still challenges in implementation, such as inaccurate targeting and administrative problems. This study provides recommendations for policy improvements to make BPNT more effective in reducing poverty and improving community welfare in Indonesia.</i>
Nomor : 5	
Bulan : Mei	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Keywords : *Non-Cash Food Assistance (BPNT), Community Welfare.*

Abstrak

Penerapan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga miskin. Program ini menggantikan bantuan pangan tunai menjadi sistem non-tunai yang lebih efisien. Dengan bantuan sebesar Rp110.000 per bulan yang ditransfer melalui ATM atau Kartu Keluarga Sejahtera, BPNT diharapkan dapat meningkatkan konsumsi pangan bergizi dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk mengevaluasi dampak BPNT terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa meskipun BPNT telah berhasil meningkatkan akses pangan, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti ketidakketepatan sasaran dan masalah administrasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan agar BPNT lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci : *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kesejahteraan Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan penyebab utama kerawanan pangan sehingga pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan menjadi pembahasan yang krusial dalam upaya untuk meningkatkan akses terhadap pangan. Implementasi yang secara nyata dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan pemberian program perlindungan sosial (*social safety program*). Pada umumnya, program perlindungan sosial yang dilaksanakan di berbagai negara berkembang adalah bantuan pangan dengan dua jenis pendekatan. Pendekatan pertama adalah pemberian bantuan pangan secara langsung (*in-kind program*), yang mendistribusikan sejumlah paket bahan pokok secara gratis maupun yang bersubsidi untuk rumah tangga miskin. Pendekatan kedua adalah dengan pemberian voucher (*voucher program*). Dengan voucher yang diberikan Program BPNT memberikan bantuan sosial sebesar Rp110.000 kepada KPM yang ditransfer setiap bulannya melalui ATM atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik, yang mana dana tersebut tidak dapat dilakukan penarikan tunai (Rachman & Agustian, 2018).

Menurut *basic price theory*, program bantuan pangan seperti BPNT dari pemerintah dapat diinterpretasikan sebagai efek peningkatan pendapatan, yang kemudian akan memengaruhi Bagaimana rumah tangga memutuskan dan mengalokasikan pengeluaran. Dengan adanya BPNT, individu dapat meningkatkan konsumsi barang makanan yang mana transfer tersebut menyebabkan garis *budget constraint* bergeser ke atas.

BPNT didesain untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan pangan agar menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Selanjutnya, BPNT juga memiliki tujuan strategis yakni untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, yang mana untuk rumah tangga miskin, kebutuhan pengeluaran makanan mencapai hampir 30 persen dari total pengeluaran bulanan (Satriawan & Shrestha, 2018). Pemberian bantuan pangan seperti ini menjadi bentuk upaya pemerintah dalam memastikan bahwa semua yang menderita kelaparan dan malnutrisi memiliki akses terhadap makanan bergizi. Implikasinya, bantuan pangan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan dan memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin (Ningtiyas, 2018).

Bantuan pangan seperti BPNT memainkan peranan yang krusial dalam mengatasi kerawanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin pertanian. Sejak diberlakukannya BPNT pada tahun 2017, fenomena kemiskinan dan kerawanan pangan di Indonesia cenderung menunjukkan kondisi yang tidak merata.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mencoba untuk menginvestigasi dampak bantuan pangan, khususnya yang bersifat nontunai (voucher program), seperti yang dilakukan oleh Abebaw et al. (2010), Banerjee et al. (2021), Melalui penerapan berbagai metode analisis, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak melihat dampak bantuanpangan terhadap berbagai jenis outcome variable. Di sisi lain, Munandar (2021) menemukan bahwa implementasi program BPNT mampu meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin dibandingkan rumah tangga menengah ke atas sehingga program BPNT dinilai efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator utama dari pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara adalah kesejahteraan masyarakatnya. Dalam perspektif pembangunan, kesejahteraan mencakup hal-hal seperti memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Kesejahteraan sosial adalah sistem organisasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memberikan perlindungan sosial dan layanan dasar (Midgley1995). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah metrik digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, termasuk konsumsi rumah tangga, status kesehatan, akses ke pendidikan, kondisi perumahan, dan partisipasi ekonomi.

Program perlindungan sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), menjadi salah satu intervensi penting pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Dengan adanya bantuan yang ditujukan secara langsung kepada kelompok rentan, program ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana program BPNT berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program BPNT adalah bagian dari transformasi kebijakan bantuan sosial pangan yang sebelumnya berbasis tunai atau beras bersubsidi (Raskin/Rastra) menjadi bantuan non-tunai yang lebih efisien dan tepat sasaran. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk meningkatkan ketepatan sasaran, mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui mekanisme transaksi elektronik di e-warung, atau warung elektronik gotong royong. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan dalam bentuk saldo

yang hanya dapat digunakan untuk membeli beras dan telur, yang merupakan bahan pangan pokok, melalui program BPNT.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk digitalisasi sistem bantuan sosial dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, karena e-warong biasanya dikelola oleh koperasi atau pelaku UMKM lokal yang menjadi bagian dari ekosistem distribusi pangan, BPNT memiliki nilai pemberdayaan. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Hermawan et al. (2021), keberhasilan program BPNT sangat bergantung pada elemen teknis dan kelembagaan, seperti kebenaran data penerima, kualitas layanan e-warong, dan keterlibatan aktor lokal dalam pelaksanaan program.

Teori Implementasi Kebijakan

Untuk memahami pelaksanaan BPNT secara komprehensif, perlu digunakan pendekatan dari teori implementasi kebijakan publik. Salah satu teori yang relevan adalah model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Pertama, komunikasi diperlukan agar informasi mengenai tujuan dan mekanisme program dapat dipahami oleh seluruh pelaksana dan masyarakat penerima manfaat. Kedua, sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, SDM, maupun sarana penunjang, harus tersedia agar program berjalan efektif. Ketiga, disposisi pelaksana atau sikap terhadap program mempengaruhi tingkat komitmen dan kualitas layanan. Keempat, struktur birokrasi yang mendukung sangat diperlukan untuk menjamin koordinasi antar lembaga serta integrasi data penerima manfaat.

Penerapan teori Edward III dalam konteks BPNT membantu mengidentifikasi titik-titik kritis dalam implementasi, seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan distribusi, dan minimnya koordinasi lintas sektor yang kerap menjadi kendala dalam realisasi bantuan sosial.

Dampak Program BPNT terhadap Kesejahteraan

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program BPNT memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Ristanti dan Fadhli (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa BPNT

berkontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin serta meningkatkan konsumsi pangan yang lebih bergizi. Namun, mereka juga mencatat bahwa implementasi program masih menghadapi masalah keterlambatan penyaluran dan keterbatasan variasi pangan.

Sementara itu, Herviyanti et al. (2021) dalam studi kasus di Kota Jambi menyoroti pentingnya validitas data dalam penyaluran BPNT. Mereka menemukan bahwa bantuan sering kali tidak tepat sasaran karena data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) belum diperbarui secara optimal. Akibatnya, beberapa keluarga yang sudah tidak memenuhi kriteria masih menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.

Penelitian lainnya oleh Saputri et al. (2023) di Palembang mengungkapkan bahwa meskipun penerima manfaat merasakan manfaat secara ekonomi, masih ada masalah administratif yang menimbulkan kebingungan, seperti perbedaan antara nama KPM dan pemilik kartu. Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis dan kebijakan yang mendasari implementasi perlu dievaluasi secara berkelanjutan.

Kemudian penelitian oleh Rizki (2024) di Majalengka menegaskan bahwa BPNT mampu memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat miskin dan meningkatkan stabilitas ekonomi rumah tangga. Penyaluran bantuan non-tunai juga mendorong perubahan perilaku keuangan karena masyarakat mulai terbiasa menggunakan sistem perbankan.

Dan yang terakhir studi penelitian Ariesta dan Nugroho (2023) selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa BPNT menjadi instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat miskin di Jakarta. Namun, tantangan seperti keterlambatan penyaluran dan kurangnya koordinasi antar lembaga sering kali menghambat optimalisasi program.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BPNT merupakan kebijakan strategis dalam kerangka perlindungan sosial di Indonesia. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi dan kesiapan kelembagaan di tingkat lokal. Penelitian mengenai dampak BPNT terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi penting untuk menilai capaian program sekaligus memberikan rekomendasi berbasis data bagi perbaikan kebijakan di masa depan.

Penelitian ini akan berkontribusi pada literatur kebijakan sosial dengan memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan antara bantuan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang intervensi sosial yang lebih adaptif dan partisipatif, terutama di tengah dinamika sosial ekonomi yang terus berubah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* sistematis untuk mengkaji pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi guna mendapatkan gambaran menyeluruh dan mendalam terkait efektivitas program. Menurut Creswell John. W. dalam (Habsy et al., 2024) mengatakan bahwa kajian literatur adalah kumpulan artikel tertulis dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menjelaskan teori dan informasi dari masa lalu maupun saat ini, dan mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi temuan-temuan yang konsisten maupun bertentangan, merumuskan kesimpulan yang lebih objektif dan berbasis data terkait keberhasilan maupun tantangan dalam pelaksanaan Program BPNT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bentuk reformasi dari program subsidi beras untuk masyarakat miskin (Rastras), yang sebelumnya dikenal sebagai Raskin. Program ini dijalankan atas instruksi Presiden Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta mendukung perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat Rastra (yang kemudian disebut Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) dilakukan melalui mekanisme non tunai (menggunakan teknologi e-voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah terjangkau. Masyarakat yang mendapatkan e-voucher dapat membeli beras dan bahan pangan lainnya sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan.

Bantuan ini disalurkan pemerintah sebagai upaya mendukung ketahanan pangan bagi keluarga miskin dan rentan. Tujuan utama dari program BPNT adalah untuk meringankan beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya. Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi KPM agar lebih seimbang, memastikan bantuan pangan diterima secara tepat waktu dan tepat sasaran, memberikan kebebasan bagi KPM dalam menentukan pilihan jenis pangan yang dibutuhkan, serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 2, manfaat BPNT ialah untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM BPNT sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan efisiensi penyaluran Bantuan Sosial, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan, meningkatkan transaksi nontunai, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Dampak Positif Penerapan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai yang merupakan salah satu program bantuan sosial dari pemerintah memiliki dampak positif dalam penerapannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dkk. (2022) Program BPNT di Kabupaten Mojokerto meningkatkan akses masyarakat penerima manfaat terhadap layanan perbankan, meningkatkan transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), meningkatkan ekonomi agen penyalur atau e-warong, serta mencegah terjadinya stunting pada anak.

Riset oleh Saputri et al. (2023) di Kecamatan Gandus Kota Palembang, mengungkapkan bahwa BPNT telah memberikan kontribusi positif dalam menyejahterakan keluarga dengan penghasilan rendah, dan bantuan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan dasar penerima.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melati et al. (2023) di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. BPNT menghasilkan dampak positif dalam membangun rasa solidaritas antara warga kelurahan. Selain itu, implementasi program kebijakan ini juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi lokal. Hal ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan interaksi sosial antara keluarga penerima BPNT dan komunitas sekitar mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2024) di Desa Sukaraja Kulon, Majalengka, juga menunjukkan dampak positif dari penerapan BPNT. Bagi Keluarga Penerima Manfaat, BPNT telah memberikan manfaat nyata berupa pengurangan pengeluaran pangan dan pemberian nutrisi yang lebih seimbang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya BPNT dapat mengurangi beban pembelian kebutuhan pangan KPM. Mereka telah melihat perubahan nyata, terutama dalam hal pengeluaran makanan, yang telah memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Berdasarkan dari penelitian penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa penerapan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbukti memberikan berbagai dampak positif

bagi masyarakat penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Dapat disimpulkan beberapa manfaat yang didapatkan bagi penerima BPNT antara lain :

1. Peningkatan akses layanan keuangan dan juga dengan adanya program BPNT ini, Keluarga Penerima Manfaat (PKM) telah berkontribusi pada agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) seperti yang terlihat pada kabupaten Mojokerto.
2. Pengurangan beban pengeluaran pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan program BPNT, beban rumah tangga bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
3. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. BPNT telah telah membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama kebutuhan pangan.
4. Meningkatnya partisipasi ekonomi lokal dan solidaritas sosial antarwarga sebagaimana yang terlihat di Kelurahan Bendulmerisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.
5. Asupan makanan yang memadai dan bernutrisi dari BPNT dapat membantu menurunkan risiko stunting dan meningkatkan kesehatan jangka panjang bagi Keluarga Penerima Manfaat.

Tantangan Dalam Implementasi BPNT

Dalam penerapan program Bantuan Pangan Non-Tunai, masih ditemukan tantangan. Hal ini karena proses penentuan penerima manfaat program BPNT masih terdapat keambiguitasan karena tidak memiliki kriteria khusus, hanya masyarakat rentan miskin atau masyarakat miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh Ogot et al. (2024) di Kelurahan Watu, Kabupaten Manggarai, menunjukkan masih terdapat tantangan dalam penerapan Program BPNT seperti ketidaksesuaian sasaran penerima dengan kenyataannya. Hal ini karena data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat tidak selalu akurat. Selain itu, adanya keterlambatan penyaluran bantuan. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh ketidakjelasan dalam jadwal penyaluran dan kendala administratif.

Dalam riset yang dilakukan oleh Saputri et al. (2025) di Kelurahan Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Tantangan yang mempengaruhi penerapan BPNT meliputi kendala teknis, Infrastruktur yang tidak memadai, terutama dalam hal jaringan internet dan mesin EDC, menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan BPNT. Kendala

administrasi, dimana proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat sering kali tidak akurat. Dan terakhir, kendala sosial ekonomi, karena akses yang sulit ke e-warung dan tingkat literasi keuangan yang rendah di kalangan penerima manfaat mempengaruhi efektivitas penggunaan bantuan non tunai.

Meskipun Program BPNT bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Tantangan tantangan dalam penerapan program BPNT ini mengindikasikan perlu dilakukan evaluasi dalam peenrapannya. Agar program BPNT dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan program dengan optimal.

Efektivitas program BPNT dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Indonesia, yang diperkenalkan sebagai bagian dari program sosial pemerintah, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga miskin dalam bentuk uang elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan. Program ini merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung rumah tangga yang rentan terhadap kondisi ekonomi yang sulit.

Secara umum, BPNT telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program ini membantu mengurangi tekanan ekonomi yang dialami oleh keluarga miskin dengan menyediakan bantuan untuk pembelian bahan pangan di e-warung. Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah menunjukkan bahwa meskipun BPNT berhasil memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan secara signifikan masih terbatas.

Salah satu aspek yang berhasil dari BPNT adalah peningkatan konsumsi pangan rumah tangga miskin. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Indramayu, misalnya, menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan melalui BPNT meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan, yang pada gilirannya membantu meningkatkan kualitas konsumsi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut efektif dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar rumah tangga miskin, yang menjadi salah satu indikator penting dalam mengurangi kemiskinan. Namun, meskipun BPNT berkontribusi dalam meringankan beban konsumsi pangan, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan secara keseluruhan masih terbatas. Di banyak daerah, meskipun penerima bantuan dapat membeli bahan pangan yang lebih baik, mereka masih menghadapi tantangan lain, seperti rendahnya akses terhadap pendidikan,

kesehatan, dan pekerjaan. Masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan pangan, sehingga meskipun BPNT memberikan bantuan yang sangat diperlukan, ia bukan solusi tunggal untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.

Selain itu, efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas dan ketersediaan e-warung, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada masalah dalam pendataan penerima yang mengakibatkan ketidaktepatan sasaran, di mana ada keluarga yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, sementara ada juga yang tidak membutuhkan bantuan justru menerima. Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi bantuan sangat penting agar BPNT dapat lebih efektif.

Dari segi infrastruktur, meskipun sudah ada banyak e-warung yang tersebar di berbagai daerah, masih ada tantangan terkait aksesibilitas dan keterbatasan pilihan barang yang dapat dibeli dengan saldo BPNT. Hal ini dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh penerima bantuan, terutama di daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang.

Secara keseluruhan, BPNT telah memberikan kontribusi dalam mengurangi beban pangan rumah tangga miskin di Indonesia. Namun, untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih substansial, program ini perlu didukung oleh kebijakan lain yang lebih luas dan terintegrasi, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. BPNT bukanlah solusi tunggal untuk kemiskinan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya komprehensif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Jumlah penerima program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu program bantuan sosial prioritas yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini bertujuan untuk membantu keluarga prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok secara lebih layak dan berkelanjutan. BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung atau agen yang telah ditunjuk pemerintah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga penerima manfaat.

Pada tahun 2025, pemerintah kembali menyalurkan BPNT kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jumlah penerima manfaat yang cukup besar. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Sosial, jumlah penerima BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) secara total pada tahap pertama tahun 2025 mencapai 10 juta Keluarga Penerima

Manfaat (KPM). Angka ini merupakan hasil dari proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara berkala melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data utama dalam penetapan penerima bantuan sosial di Indonesia.

Penyaluran BPNT pada tahun 2025 dilakukan secara bertahap, dengan pencairan dana yang dimulai pada pertengahan hingga akhir Mei untuk tahap kedua. Pemerintah menegaskan bahwa proses pemutakhiran data penerima BPNT dan PKH terus dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Proses pemutakhiran ini melibatkan integrasi data dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), sistem SIKS-NG Supervisor, serta Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang disediakan oleh Kemensos, sehingga transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan dapat terjaga.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp28,7 triliun untuk program BPNT dan PKH pada tahun 2025, dengan besaran bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi nasional. Jumlah penerima BPNT sendiri biasanya berkisar antara 8 hingga 10 juta KPM setiap tahunnya, namun pada tahun 2025, data yang tersedia menunjukkan angka 10 juta KPM sebagai gabungan penerima BPNT dan PKH pada tahap pertama. Angka ini dapat berubah seiring dengan proses pemutakhiran dan validasi data yang terus dilakukan pemerintah.

Melalui program BPNT, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan. Dengan pemutakhiran data yang terus dilakukan dan upaya peningkatan transparansi, diharapkan bantuan sosial ini dapat benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025, jumlah penerima BPNT di Indonesia mencapai sekitar 10 juta KPM, berdasarkan data valid yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Pemerintah terus berkomitmen untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Bentuk dan Nilai Bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial dari pemerintah Indonesia yang diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini dirancang untuk

membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan pokok secara terarah dan terkontrol. Saldo BPNT tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras, telur, tahu, tempe, dan sumber protein lainnya di e-Warong (elektronik warung gotong royong) atau pedagang mitra bank penyalur yang telah bekerja sama dengan bank Himbara, yaitu BNI, BRI, BTN, dan Mandiri.

Untuk tahun 2025, nilai bantuan BPNT ditetapkan sebesar Rp200.000 per bulan per keluarga. Penyaluran bantuan dilakukan secara triwulanan, sehingga setiap tahap penyaluran mencakup tiga bulan dan total bantuan yang diterima KPM pada setiap tahap adalah Rp600.000. Sepanjang tahun 2025, bantuan BPNT disalurkan dalam empat tahap, sehingga total bantuan yang diterima setiap keluarga penerima mencapai Rp2.400.000.

Penyaluran BPNT tahap kedua tahun 2025 dimulai pada Mei dan mencakup alokasi dana untuk bulan April, Mei, dan Juni. Pencairan dilakukan secara bertahap dan dapat masuk ke rekening penerima pada awal, tengah, atau akhir bulan, sehingga penerima disarankan untuk secara berkala mengecek status pencairan melalui laman resmi Kementerian Sosial, seperti cekbansos.kemensos.go.id. Penyaluran dilakukan melalui dua saluran utama, yakni bank Himbara dan Kantor Pos Indonesia. Penerima yang telah memiliki dan mengaktifkan KKS akan menerima bantuan secara langsung melalui transfer ke rekening mereka, sementara penerima baru atau yang belum memiliki KKS akan menerima bantuan melalui mekanisme penyaluran kolektif yang dibantu oleh petugas dinas sosial di daerah masing-masing.

Selain itu, pemerintah menerapkan sistem penyaluran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) dengan pendekatan desil ekonomi, yang memprioritaskan masyarakat kategori desil 1 hingga 6 sebagai penerima manfaat. Hal ini bertujuan agar bantuan lebih tepat sasaran dan hanya diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Dengan mekanisme ini, BPNT tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara khusus untuk kebutuhan pangan pokok, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas gizi keluarga penerima. Sistem penyaluran yang transparan dan digital juga memudahkan penerima dalam memantau bantuan yang diterima serta memastikan akurasi dan keamanan penyaluran bantuan sosial ini.

Singkatnya, BPNT 2025 memberikan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan yang disalurkan setiap tiga bulan sebesar Rp600.000, dengan total Rp2.400.000 per tahun, melalui saldo elektronik di KKS yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di

e-Warong atau pedagang mitra resmi, disalurkan secara bertahap melalui bank Himbara dan Kantor Pos dengan sistem penyaluran yang terintegrasi dan berbasis data valid.

Sintesis dan Implikasi Kebijakan

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan dan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial pangan secara non tunai kepada keluarga miskin yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini menggantikan program sebelumnya seperti Raskin dan Rastra, dengan mekanisme yang lebih modern dan fleksibel, yaitu pemberian saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan pokok di e-warong atau pedagang mitra bank penyalur.

Secara umum, BPNT telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Dengan sistem non tunai, program ini mampu menjamin bantuan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi sesuai prinsip 6T yang diusung pemerintah. Selain itu, penggunaan sistem elektronik juga mendukung agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang mendorong transaksi non tunai di masyarakat.

Pembelajaran dari berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan BPNT sangat bergantung pada validitas dan mutakhirnya data penerima, serta ketersediaan infrastruktur digital yang memadai. Hambatan seperti keterbatasan akses internet dan literasi digital di daerah terpencil masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima. Studi juga menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penyaluran agar menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan bantuan digunakan sesuai tujuan.

Dari perspektif ilmiah, rekomendasi perbaikan program BPNT meliputi beberapa hal berikut: pertama, pemutakhiran data penerima secara berkala dengan melibatkan masyarakat dan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi dan responsivitas data; kedua, peningkatan literasi digital dan pendampingan bagi KPM agar mereka mampu mengakses dan menggunakan bantuan dengan baik; ketiga, penguatan infrastruktur digital di wilayah terpencil untuk mendukung penyaluran dan monitoring secara real-time; keempat, diversifikasi jenis bahan pangan yang dapat dibeli sesuai kebutuhan gizi dan kondisi lokal; kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk menjaga integritas program; serta keenam, integrasi BPNT dengan program pemberdayaan ekonomi agar penerima tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, BPNT telah menjadi program sosial yang efektif dalam meningkatkan akses pangan keluarga miskin dan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, perbaikan berkelanjutan berdasarkan evaluasi ilmiah dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar program ini dapat terus berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diluncurkan sebagai reformasi dari program subsidi beras (Rastra/Raskin) dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan, efektivitas penyaluran, dan inklusi keuangan bagi keluarga miskin. Melalui saldo elektronik sebesar Rp 200.000 per bulan yang ditransfer ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) bebas memilih kombinasi bahan pangan pokok di e-Warong atau pedagang mitra bank penyalur, sehingga beban pengeluaran pangan berkurang dan asupan gizi menjadi lebih seimbang. Berbagai studi menunjukkan BPNT menurunkan risiko stunting anak, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan transaksi non-tunai, yang pada gilirannya membuka peluang usaha mikro di desa maupun kelurahan.

Di sisi lain, efektivitas BPNT masih terhambat oleh beberapa kendala: data penerima yang belum sepenuhnya akurat akibat proses verifikasi yang kompleks, infrastruktur digital terutama jaringan internet dan mesin EDC yang belum merata di wilayah terpencil, serta rendahnya literasi digital dan keuangan di kalangan KPM, yang menyebabkan penyaluran sering terlambat dan e-Warong sulit diakses. Hambatan administratif dan kurangnya pilihan ragam pangan di beberapa agen juga mengurangi manfaat yang diharapkan.

Untuk mengoptimalkan dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), diperlukan perbaikan berkelanjutan melalui:

1. Pemutakhiran data penerima secara berkala dengan melibatkan masyarakat dan integrasi berbagai basis data (DTSN, SIKS-NG, BPS).
2. Penguatan infrastruktur digital, termasuk perluasan jangkauan internet dan penambahan mesin EDC di e-Warong terpencil.
3. Pendampingan literasi digital dan keuangan bagi KPM agar mereka mampu memanfaatkan saldo elektronik secara optimal.
4. Diversifikasi jenis bahan pangan sesuai kebutuhan gizi dan kekayaan lokal.

5. Pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk menjaga integritas distribusi bantuan.
6. Integrasi BPNT dengan program pemberdayaan ekonomi guna mendorong kemandirian jangka panjang masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, BPNT diharapkan tidak hanya tepat sasaran dan efisien, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, Y., & Nugroho, S. (2023). "Implementasi BPNT selama Pandemi: Studi Kasus di Jakarta Barat". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial UI*, 24(1), 1–15.
<https://scholarhub.ui.ac.id/jiks/vol24/iss1/1/>
- Hermawan, F., et al. (2021). "Efektivitas Pelaksanaan Program BPNT di Kota Yogyakarta". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 233–245.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/2237>
- Herviyanti, E., et al. (2021). "Efektivitas Program BPNT di Kota Jambi". *Jurnal Administrasi dan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 58–70.
<https://onlinejournal.unja.ac.id/JALOW/article/view/13327>
- <https://fahum.umsu.ac.id/info>. (2025, March 7). BPNT: Program Bantuan Pangan Non- Tunai untuk Meningkatkan Gizi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Info Hukum*.
<https://fahum.umsu.ac.id/info/bpnt-program-bantuan-pangan-non-tunai-untuk-meningkatkan-gizi-dan-kesejahteraan-masyarakat/>
- KATA PENGANTAR. (n.d.).
<https://badanpangan.go.id/storage/app/uploads/public/5d2/406/7b6/5d24067b6400b775625006.pdf>
- Melati Putri Arsika. (2025, May 12). Bansos BPNT Tahap 2 Cair Mei 2025, Ini Jadwal dan Cara Cek Nama Penerima. *Detiksumbagsel*; detikcom.
<https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7910772/bansos-bpnt-tahap-2-cair-mei-2025-ini-jadwal-dan-cara-cek-nama-penerima>
- Mutia Tresna Syabania. (2025, May 11). Informasi Penting! Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025, Pemutakhiran Data DTSN Selesai, Cek Kembali Data Anda - Radar Bogor. *Informasi Penting! Jadwal Pencairan Bansos PKH Dan BPNT Tahap Kedua 2025, Pemutakhiran Data DTSN Selesai, Cek Kembali Data Anda - Radar Bogor*; Radar

- Bogor. <https://radarbogor.jawapos.com/nasional/2475995983/informasi-penting-jadwal-pencairan-bansos-pkh-dan-bpnt-tahap-kedua-2025-pemutakhiran-data-dtsn-selesai-cek-kembali-data-anda>
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publications.
- Permensos No. 20 Tahun 2019. (2019). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129449/permensos-no-20-tahun-2019>
- Rahman, H., Khumayah, S., & ARTIKEL ABSTRAK Kata Kunci, I. (2024). Pengaruh Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Efektivitas Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Indramayu. Desember, 5(12).
- Rupertus Suwandi Ogot, Pramono, S., & Widyawati. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 179-188. Retrieved from <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/8083>
- Ristanti, M., & Fadhli, M. (2021). "Analisis Dampak Program BPNT terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pojokkulon". *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 3(2), 180–193. <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/2590>
- Rizki, N. (2024). "Efektivitas Program BPNT terhadap Konsumsi Pangan Keluarga di Majalengka". *Jurnal Pengabdian Masyarakat UNMA*, 7(2), 45–57. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jumash/article/view/11323>
- Saputri, R., et al. (2023). "Evaluasi Pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Gandus, Kota Palembang". *Jurnal Praja*, 5(1), 90–103. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/1601>
- Saputri, A., & Hamid, A. (2025). Tantangan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 28-37.
- View of EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG INKLUSI SOSIAL: TINJAUAN DARI PRESFEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK. (2025). Darmaagung.ac.id. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/3453/3102>